

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Tentara Nasional Indonesia Matra Darat

Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara di bidang pertahanan yang bertugas dengan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 5). Dalam pembangian Matra TNI, terdapat beberapa matra utama, yakni TNI Matra Laut, TNI Matra Udara, dan TNI Matra Darat. TNI AD adalah bagian dari TNI, berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan di darat yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara serta menjalankan fungsi TNI sebagai penangkal maupun penindak setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar serta dalam negeri, terhadap keutuhan wilayah, keselamatan bangsa, dan yang membahayakan kedaulatan negara serta pemulih terhadap kondisi keamanan negara di darat yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Dalam menjalankan perannya, TNI AD memiliki visi “profesional dan dicintai rakyat”.

TNI AD yang profesional dituntut memiliki kemampuan yang mumpuni sebagai kekuatan penangkal, penindak, dan pemulih dalam menghadapi setiap ancaman. Profesionalisme TNI AD ini diwujudkan melalui pembinaan kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan yang menghasilkan totalitas kekuatan pertahanan matra darat. Dengan demikian, pembinaan TNI AD diarahkan ke segenap aspek pembinaan postur TNI AD.

Potret TNI AD yang dicintai rakyat menunjukkan pentingnya kemandirian TNI-Rakyat dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Prajurit TNI AD mampu merebut simpati rakyat serta memahami benar-benar hati nurani dan pikiran rakyat agar rakyat mempercayai, mencintai, serta menaruh simpati terhadap perjuangan TNI AD.

Dijelaskan dalam Doktrin TNI “Tri Dharma Eka Karma” bahwa TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya dilaksanakan melalui Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), bahwa dukungan OMSP yang diberikan TNI dilaksanakan melalui tugas pembantuan TNI yang diselenggarakan atas dasar permintaan dan keputusan politik pemerintah atau bila penyelenggaraan pembantuan tersebut atas dasar inisiatif TNI harus terlebih dahulu melalui mekanisme dan persetujuan dari Presiden RI.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan tugas-tugasnya, TNI AD menyelenggarakan beberapa fungsi diantaranya fungsi utama berupa:

- a. Pertempuran. Fungsi ini menyelenggarakan penggunaan kekuatan matra darat dengan melaksanakan pertempuran di darat melalui OMP dan OMSP. Penyelenggaraan fungsi ini meliputi: intelijen, manuver, tembakan, perlindungan, dukungan, kodal dan informasi terkait pertahanan negara di darat.
- b. Pembinaan Postur. Fungsi ini menyelenggarakan pembinaan pengembangan kekuatan, kemampuan, dan gelar kekuatan satuan TNI AD yang profesional dan proporsional.
- c. Pembinaan Teritorial. Fungsi ini menyelenggarakan perencanaan, pengembangan, pengerahan, dan pengendalian potensi wilayah pertahanan dengan segenap aspeknya untuk menjadi kekuatan sebagai ruang, alat, dan kondisi juang yang

tangguh dalam bentuk ketahanan wilayah untuk kepentingan pertahanan negara di darat.

4.1.2 Komponen Cadangan Unsur Warga Negara

Undang-Undang No. 23 tahun 2019 tentang PSDN pada Pasal 1 Ayat (9) menjelaskan bahwa Komponen Cadangan adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama (TNI). Komcad sendiri terdiri atas 4 (empat) unsur, yaitu warga negara, sumber daya alam (SDA), sumber daya buatan (SDB), dan sarana dan prasarana nasional (Sarprasnas). Dalam penelitian ini yang menjadi objek kajian adalah Komcad sebagai unsur warga negara. Komcad sebagai warga negara dipersiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida.

Yang dimaksud dengan ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Ancaman militer dapat berbentuk, antara lain:

- a. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara, antara lain:
 - 1) Invasi berupa serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 2) Bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 3) Blokade terhadap pelabuhan atau pantai atau wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh angkatan bersenjata negara lain.
 - 4) Serangan unsur angkatan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat atau satuan laut atau satuan udara Tentara Nasional Indonesia.
 - 5) Unsur kekuatan bersenjata negara lain yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian yang tindakan atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian.
 - 6) Tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 7) Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara lain untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melakukan tindakan seperti tersebut di atas.
- b. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik yang menggunakan kapal maupun pesawat non komersial.
 - c. Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer.
 - d. Sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan obyek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa.
 - e. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam

negeri atau terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.

- f. Pemberontakan bersenjata.
- g. Perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya.

Yang dimaksud dengan ancaman hibrida adalah ancaman yang bersifat campuran dan merupakan keterpaduan antara ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Ancaman nonmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, keselamatan umum, teknologi dan legislasi yang berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri.

Sifat keanggotaan Komcad adalah sukarela. Masa pengabdian Komcad terbagi menjadi 2 (dua) yaitu masa aktif dan masa tidak aktif. Masa aktif Komcad merupakan masa pengabdian Komcad pada saat mengikuti pelatihan penyegaran dan/atau pada saat Mobilisasi. Masa tidak aktif merupakan masa pengabdian Komcad dengan melaksanakan pekerjaan dan/atau profesi semula. Komcad selama masa aktif diberlakukan hukum militer. Komcad dikelola melalui kegiatan pembentukan dan penetapan, pembinaan serta penggunaan dan pengembalian.

4.1.2.1 Pembentukan dan penetapan

Pembentukan Komcad dikelompokkan menjadi Komcad Matra Darat, Komcad Matra Laut dan Komcad Matra Udara. Proses pembentukan Komcad masing-masing matra akan melalui tahapan:

- a. Pendaftaran.

Setiap warga negara Indonesia berhak mendaftar menjadi calon Komcad selama memenuhi persyaratan, yaitu: beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun; sehat jasmani dan rohani; dan tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Seleksi.

Tahap seleksi meliputi seleksi administratif berupa pemeriksaan kelengkapan administrasi dan uji keabsahan dokumen dan seleksi kompetensi berupa uji kesehatan, kemampuan, pengetahuan/wawasan, dan sikap calon Komcad.

c. Pelatihan dasar kemiliteran.

Setelah calon Komcad lulus seleksi selanjutnya wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama 3 (tiga) bulan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan di lingkungan TNI, dan/ atau kesatuan TNI. Selama mengikuti pelatihan dasar kemiliteran, calon Komcad berhak memperoleh: uang saku; perlengkapan perseorangan lapangan (Kaporlap); rawatan kesehatan; dan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Calon Komcad yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja/buruh selama menjalani pelatihan dasar kemiliteran sebagai calon Komcad tetap memperoleh hak ketenagakerjaannya dan tidak menyebabkan putusannya hubungan kerja dengan perusahaan atau instansi tempatnya bekerja. Calon Komcad yang berstatus mahasiswa selama menjalani pelatihan dasar kemiliteran sebagai calon Komcad tetap memperoleh hak akademisnya dan tidak menyebabkan kehilangan status sebagai peserta didik.

d. Penetapan.

Calon Komcad yang telah lulus mengikuti pelatihan dasar kemiliteran diangkat dan ditetapkan menjadi Komcad oleh Menteri Pertahanan. Dalam proses pelantikan, Komcad wajib mengucapkan sumpah/janji Komcad menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4.1.2.2 Pembinaan

Pembinaan Komcad dilakukan selama masa pengabdian sesuai dengan matra meliputi kegiatan pembinaan administratif dan pembinaan kemampuan. Pembinaan administrasi Komcad meliputi kepegangatan dan pemutakhiran data/identitas.

Pembinaan kemampuan dilaksanakan melalui pelatihan penyegaran yang merupakan latihan untuk memelihara dan meningkatkan serta menjaga kemampuan dalam bidang pengetahuan dan keterampilan untuk kepentingan pertahanan negara secara bertahap dan berkelanjutan. Masa pelatihan penyegaran dilaksanakan paling singkat 12 (dua belas) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari yang dilaksanakan di lembaga pendidikan di lingkungan TNI, daerah latihan militer, dan/atau kesatuan TNI setingkat Batalyon.

4.1.2.3 Penggunaan dan pengembalian

Komcad digunakan untuk memperbesar dan memperkuat Komponen Utama (TNI) setelah adanya pernyataan mobilisasi oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penggunaan Komcad berada di bawah komando dan kendali Panglima TNI. Komcad dikembalikan setelah adanya pernyataan demobilisasi oleh Presiden. Pengembalian Komcad berada di bawah komando dan kendali

Panglima TNI. Komcad melaksanakan pengabdian sebagai Komcad sampai dengan usia paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Kekuatan TNI Angkatan Darat Dalam Pertahanan Negara

Tentara Nasional Tentara Indonesia (atau TNI Angkatan Darat atau TNI-AD) adalah cabang angkatan bersenjata, di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dibentuk bersamaan dengan TNI pada tanggal 5 Oktober 1945. TNI sebelumnya bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) yang merupakan pimpinan tertinggi Markas Besar Angkatan Darat (MABESAD). KASAD saat ini dijabat oleh Jenderal TNI Andika Perkasa.

Pasukan TNI-AD saat ini terdiri dari dua komando utama tempur (Kotama), yaitu Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dan Komando Pasukan Khusus (Kopassus), serta Satuan Kewilayahan (Satkowil) TNI-AD yang terdiri dari 15 Komando Daerah Militer (Kodam) sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. I / Bukit Barisan | 9. XIII / Merdeka |
| 2. II / Sriwijaya | 10. XIV / Hasanuddin |
| 3. III / Siliwangi | 11. XVI / Pattimura |
| 4. IV / Diponegoro | 12. XVII / Cenderawasih |
| 5. V / Brawijaya | 13. XVIII / Kasuari |
| 6. VI / Mulawarman | 14. Jaya/Jayakarta |
| 7. IX / Udayana | 15. Iskandar Muda |
| 8. XII / Tanjungpura | |

Seluruh wilayah Indonesia (punya unit tempur sendiri). Pelopor TNI di masa-masa awal kemerdekaan Indonesia dimulai dengan penggabungan

angkatan bersenjata pelatih militer dari Jepang (PETA), Belanda (KNIL) dan India. Tentara Rakyat. Hasil penggabungan tersebut menghasilkan sebuah organisasi bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang kemudian berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR),

Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Nasional Indonesia (TRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sejak awal berdirinya, TNI telah menghadapi berbagai tugas dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seluruh bangsa dan nenek moyang seluruh rakyat Indonesia terancam dan terusik sehingga merusak keutuhan bangsa dan negara.

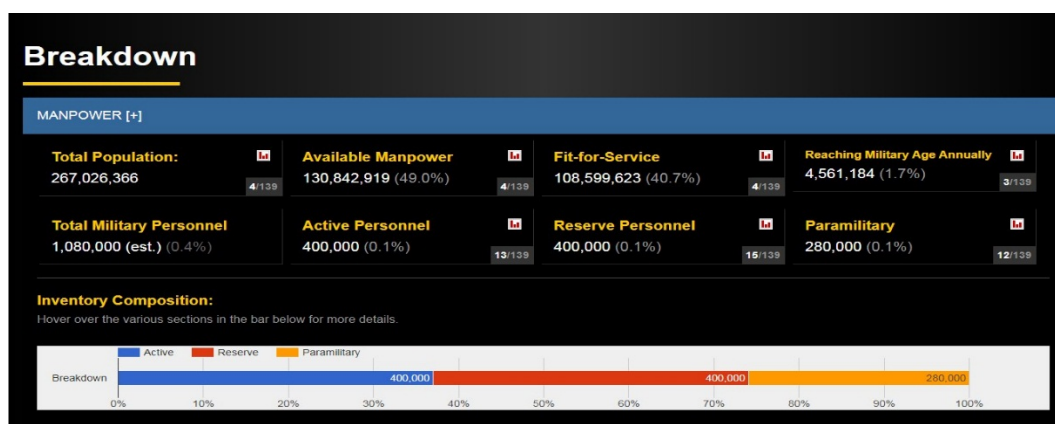
TNI dan rakyat melakukan aksi domestik, seperti penindasan Medien terhadap PKI tahun 1948 dan kampanye 30 September 1965 untuk menentang pemberontakan DI / TII di Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan Pemberontakan PRRI di pulau Barat Sumatra Manado, Kahar Muzakar di Provinsi Sulawesi Selatan, PGRS / Palaku di Provinsi Kalimantan Barat, Republik Maluku Selatan di Ambon, GPLHT di Aceh, Komite Garuda di Sumatera Selatan dan OPM Irian. Perjuangan ini dilakukan untuk menyelamatkan nyawa bangsa dan negara, serta menegakkan prinsip keutuhan persatuan Indonesia dan Indonesia. Untuk acara nasional seperti pemilu, muktamar / pertemuan khusus MPR, dan operasi pengamanan untuk keselamatan konflik masyarakat. Tindakan keamanan semacam ini didasarkan pada kepentingan negara dan negara, dan telah menyelamatkan negara dan nyawanya.

Untuk mengukur kekuatan TNI AD, akan sangat jelas tergambar dari postur yang ada di TNI. Kebijakan pembangunan postur pertahanan militer yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, meliputi:

- a. Pembangunan sumber daya manusia yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap dinamika perkembangan lingkungan strategis, diselenggarakan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan serta adopsi dan adaptasi teknologi baru.
- b. Mewujudkan pemenuhan kekuatan pokok Tentara Nasional Indonesia sehingga terbentuk kekuatan penangkal efektif yang memiliki daya pukul yang memadai dan mobilitas yang tinggi, kekuatan pokok Tentara Nasional Indonesia tersebut harus didukung oleh Komponen Cadangan yang efektif dan kuat sehingga dapat melaksanakan perang berlarut di seluruh wilayah nasional jika negara diinvasi oleh kekuatan asing.
- c. Mengintegrasikan pembangunan jaringan sistem pertahanan Trimatra Terpadu (tiga matra secara terpusat) guna menunjang kebijakan poros maritim dunia menuju kekuatan maritim yang disegani di kawasan.
- d. Melanjutkan modernisasi alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia guna memperkuat persenjataan strategis dan taktis untuk ketiga matra.
- e. Pembentukan dan penetapan Komponen Cadangan Matra Darat, Matra Laut, dan Matra Udara guna memperbesar kekuatan dan memperkuat kemampuan Komponen Utama dalam menghadapi ancaman.
- f. Penataan Komponen Pendukung diarahkan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan.

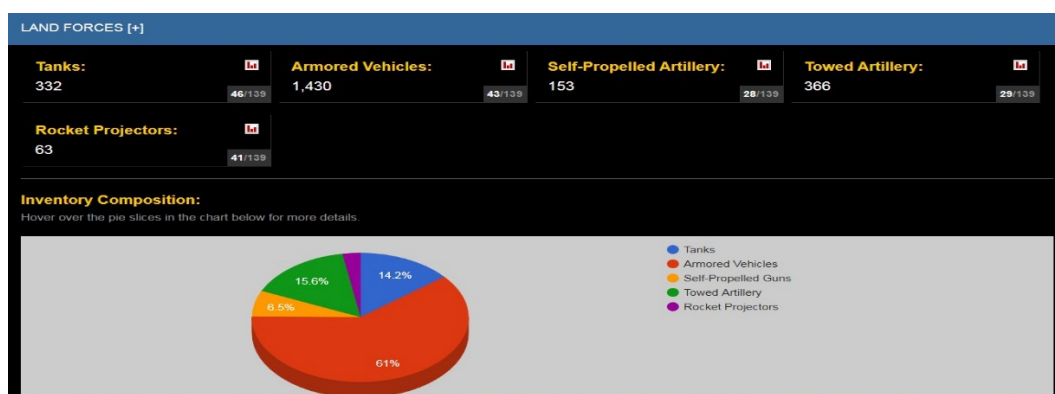
Di tahun 2021, kekuatan militer Indonesia berada di nomor urutan ke-16 dunia dari 139 negara berdasarkan pemeringkatan Global Firepower.

Gambar 5. Kekuatan militer Indonesia menurut Global Firepower



Sumber: <https://www.globalfirepower.com>

Gambar 6. Kekuatan Angkatan Darat Indonesia menurut Global Firepower



https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=indonesia

Skor power index itu dilihat dari 50 faktor yang menentukan. Faktor geografis, fleksibilitas logistik, sumber daya alam dan industri lokal mempengaruhi hasil peringkat akhir. Ketersediaan tenaga kerja dan jumlah populasi menjadi salah satu faktor utama penilaian. Jumlah personel TNI: aktif dan cadangan. Jumlah alutsista: AU, AD, AL. SDA: produksi minyak bumi, konsumsi minyak bumi, dan cadangan minyak bumi. Logistik: jumlah tenaga kerja, jumlah kapal dagang, jumlah pelabuhan dan terminal, jumlah km jalan raya, jumlah km rel kereta api, jumlah bandara. Finansial: budget

pertahanan, hutang luar negeri, cadangan devisa, PPP. Geografi: luas daratan, panjang pesisir, panjang perbatasan darat, panjang jalur perairan. Semua elemen-elemen ini diberi skor (ada yang minus ada yang plus) dan hasil penjumlahannya diurutkan. Global Firepower tidak menghitung kualitas personel TNI, kemampuan dan taktik dalam bertempur serta kultur TNI. Padahal ini bisa menjadi penentu daripada perhitungan jumlah pasukan dan alutsista.

4.2.2 Pembentukan Komponen Cadangan Matra Darat Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Angkatan Darat Terhadap Pertahanan Negara

Pada bagian ini akan memberikan beberapa hasil penelitian yang menjelaskan tentang konsepsi Pembentukan Komponen Cadangan Matra darat. Dalam bagian ini akan dibagi menjadi dua macam pembahasan yakni pembentukan dan penggunaan Komponen Cadangan matra darat.

4.2.2.1 Pembentukan Komcad Matra Darat

Pembentukan Komponen Cadangan Matra Darat merupakan satu tahapan yang cukup krusial dalam menjelaskan konsepsi Komcad. Berikut ini merupakan proses pembentukan Komcad Matra Darat yang akan dijabarkan dalam beberapa tahapan. Berikut merupakan tahapan-tahapan dalam pembentukan Komponen Cadangan Matra Darat.

a. Pendaftaran.

Pendaftaran akan dilaksanakan secara online dengan mengisi data dan NIK (nomor induk kependudukan) di halaman situs (WEB) Kemhan RI (Rudi Setiawan, Wawancara, 5 Februari 2021). Sebelum pendaftaran dibuka, terlebih dahulu akan dilaksanakan sosialisasi dan pengumuman melalui media cetak,

media elektronik, dan/atau media sosial oleh Kemhan dan lembaga-lembaga terkait serta Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) setingkat Kodim dan Koramil dalam hal ini Pasiter,

Danramil dan Babinsa akan bertugas melaksanakan sosialisasi tentang rekrutmen Komcad Matra Darat. (M. Iqbal Lubis, Wawancara, 5 Februari 2021). Setelah calon Komcad mendaftar, selanjutnya adalah pelamaran yang merupakan kegiatan penyerahan persyaratan/berkas administrasi dan mendapatkan nomor pendaftaran di Kodim.

Rekrutmen Komcad untuk tahun 2021 direncanakan untuk Matra Darat saja seluruhnya sebanyak 25.000 orang. Rekrutmen direncanakan akan berlangsung sampai tahun 2044.

b. Seleksi.

Setelah calon Komcad memenuhi persyaratan administrasi selanjutnya melaksanakan Rik Kes, Rik Psi, Rik/Uji Jas dan Litpers Wawancara sesuai jadwal yang telah ditentukan. Seleksi bagi calon Komcad Matra Darat sama persis dengan seleksi calon Prajurit TNI (Rudi Setiawan, Wawancara, 5 Februari 2021). Seleksi ada 2 tingkatan yaitu tingkat Sub Panda yang berada di Korem atau Kodim Berdiri Sendiri (BS).

d. Pelatihan dasar kemiliteran.

Setelah Calon Komcad berhasil melewati seleksi dan dinyatakan lulus, selanjutnya mereka akan dilatih dasar kemiliteran selama 3 bulan. Hasilnya akan dapat ijazah dan nilai. Informasi itu di *record* dan data dipegang oleh Kemhan. Kodam bisa melihat data tersebut melalui link yang telah ditentukan. Sifat

dari data tersebut rahasia sehingga tidak semua orang dapat mengaksesnya.

Latsarmil akan diselenggarakan di Rindam dari 12 Kodam. 3 Kodam yang tidak menggelar pendidikan yaitu Kodam Iskandar Muda, Kodam Jaya dan Kodam XVIII/Kasuari (Rudi Setiawan, Wawancara, 5 Februari 2021).

Selama pendidikan, Komcad diberikan hak yang sama seperti yang diberikan kepada TNI. Uang saku (1 juta tiap bulan), baju PDL, sepatu, helm, perlengkapan tempur, senjata SS2 v5 A1 yang sekarang dipakai oleh Kopassus. Inventaris dibawa masing-masing setelah selesai melaksanakan Latsarmil kecuali senjata. Setelah 1 tahun mereka akan menggunakannya kembali untuk kegiatan penyegaran (Rudi Setiawan, Wawancara, 5 Februari 2021).

d. Penetapan.

Komcad yang bersumber dari umum akan diberi pangkat golongan Tamtama. Komcad yang bersumber dari mahasiswa yang sedang melaksanakan kuliah diberi pangkat Sersan Mayor. Apabila dia lulus kuliah menjadi mahasiswa S1 pangkatnya dinaikan menjadi Letnan Dua (Rudi Setiawan, Wawancara, 5 Februari 2021).

Saat ini Ditjen Pothan sedang mengajukan konsep Peraturan Menteri (Permen) yang merupakan turunan daripada PP Nomor 3 tahun 2021. Kedua Permen itu berisi tentang Tuktapbin (Pembentukan, Penetapan dan Pembinaan), dan Permen tentang Kurikulum Latihan Dasar Militer.

Untuk tahap awal ini direncanakan akan merekrut 25.000 orang yang diperangapkan dari orang umum usia 18 sampai 35 tahun sesuai persyaratan, selanjutnya mereka diberi pangkat golongan Tamtama yang akan dibentuk kedalam 30 (tiga puluh) Batalyon Komcad (Yonkomcad). 1 Batalyon terdiri dari 800 orang (Rudi Setiawan, Wawancara, 5 Februari 2021). Selanjutnya juga akan dibentuk 6 Brigade. 1 Brigade sebanyak 1.176 (seribu seratus enam puluh tujuh). Jadi total Komponen Cadangan ada 6 Brigade dan 30 Batalyon (Rudi Setiawan, Wawancara, 5 Februari 2021).

Setelah Komcad dilantik, mereka akan dikembalikan ke masyarakat sesuai domisili (alamat di KTP). Ada 2 masa pengabdian yaitu masa aktif dan masa tidak aktif. Masa aktif itu adalah Latsarmil 3 bulan dan latihan penyegaran serta saat Komcad di mobilisasi. Latihan penyegaran diselenggarakan setahun setelah Latsarmil selama 12 sampai maksimal 90 hari (3 bulan) di satuan-satuan yang dibentuk.

Ada dua status Komcad, pada saat masa aktif berstatus militer dan pada masa tidak aktif berstatus sipil. Sebagai konsekuensi atas statusnya maka sistem hukum yang berlaku ikut menyesuaikan. Saat berstatus militer berlaku hukum militer dan saat berstatus sipil berlaku hukum sipil atas dirinya. Struktur organisasi Komcad Matra Darat menggunakan struktur organisasi dari TNI AD (Batalyon). Untuk Jabatan Danyon dipegang militer aktif. Jabatan Komcad Matra Darat paling tinggi setingkat Danton (Rudi Setiawan, Wawancara, 5 Februari 2021).

4.2.2.1 Penggunaan Komponen Cadangan Matra Darat

Saat ini diseluruh Indonesia ada 514 Kota dan Kabupaten. 416 Kabupaten dan 98 Kota dari 34 Propinsi. Dari 514 ada 132 Kota/Kabupaten tidak ada satuan TNI setingkat Kodim/Korem yang ada hanya tingkat Koramil saja (Rudi Setiawan, Wawancara, 5 Februari 2021). Contohnya

Kabupaten Bangka Belitung, letak Kodim berada di Pangkal Pinang, tapi di Bangka Tengah, Bangka Induk, Bangka Selatan itu tidak ada kantor Kodim, yang ada hanya Koramil sedangkan satuan kepolisian sudah membentuk tiap 1 Kabupaten/Kota dengan 1 Polres (AKBP/Letkol). Terjadi ketimpangan (*counter part*) antara Bupati-AKBP-Kapten. Kekosongan kekuatan TNI di 132 Kabupaten/Kota menjadi sorotan bagi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sehingga berencana mengisi daerah tersebut dengan Batalyon-Batalyon Komcad, sebagai pelapis dan pendukung kekuatan utama (TNI) juga sebagai mata dan telinga TNI (Rudi Setiawan, Wawancara, 5 Februari 2021).

Setelah dikembalikan ke masyarakat, Komcad wajib lapor apabila ada informasi yang menyangkut pertahanan dan situasi luar biasa. Mereka diposisikan sebagai mata dan telinga seperti Babinsa. Komcad sebagai informan awal bisa mengirimkan data ke Kemhan, selanjutnya Kemhan akan meneruskan lagi ke Kodim. Misalkan informasi adanya bencana alam, atau tanah longsor, gempa dan sebagainya yang bersifat ancaman.

Pada saat Komcad Matra Darat berada dimasa aktif, pemegang kendali adalah Kodam dan pada masa tidak aktif mereka dikembalikan ke masyarakat dan tidak ada kendali atas mereka, artinya TNI AD hanya dapat mengawasi mereka. Fungsi pengawasan dilaksanakan oleh satuan setingkat Kodim. Selama masa tidak aktif, Komcad tidak mendapatkan hak kesejahteraan apapun (gaji, ULP, jaminan/asuransi, tunjangan, pensiun, dll) seperti yang diterima oleh tentara organik.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Kekuatan TNI Angkatan Darat Dalam Pertahanan Negara

Pembangunan pertahanan negara merupakan upaya menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dan menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan non militer. Dengan mengacu pada RPJMN 2004—2009, kebijakan pembangunan pertahanan negara mengarah kepada peningkatan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista), penggantian dan pengembangan alutsista yang sudah tidak layak pakai, pengembangan secara bertahap dukungan pertahanan, peningkatan kesejahteraan prajurit, serta peningkatan peran industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI.

Kemampuan suatu negara untuk membangun kekuatan pertahanan nasional harus selalu dikaitkan dengan kemampuannya untuk mengubah sumber daya nasionalnya menjadi sarana bersenjata yang efektif. Salah satu sumber daya nasional berupa sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pengamanan pertahanan negara. Kompleksitas masalah pertahanan negara dan perkembangan ancaman yang semakin beragam tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang handal untuk melaksanakan atau merumuskan kebijakan pertahanan negara. Indonesia tidak bisa lagi memprioritaskan angkatan bersenjata dalam menjaga kedaulatannya. Oleh karena itu, diperlukan penguasaan kemampuan pengelolaan teknologi pertahanan dan sumber daya manusia.

Sampai saat ini, kemampuan pertahanan negara telah mengalami kemajuan yang ditunjukkan dengan proksi indikator meningkatnya kesiapan alutsista dan terselenggaranya latihan gabungan TNI sesuai dengan rencana. Namun, secara keseluruhan, pembangunan pertahanan negara baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan yang masih terbatas di bawah standar tingkat kemampuan penangkalan bila dihadapkan dengan tugas, jumlah penduduk, dan luas wilayah beserta kekayaan yang terkandung di dalamnya yang harus dijaga integritas dan keutuhan wilayah yuridiksinya. Permasalahan yang dihadapi, langkah

kebijakan dan hasil-hasil yang dicapai, serta tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan adalah sebagai berikut.

Pertahanan negara menitikberatkan kepada falsafah sebagaimana untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya negara dengan melakukan kegiatan politik maupun militer. Dalam usahanya untuk mengatur perencanaan memperkuat lini pertahanan, awak pertahanan harus mendapatkan perhatian yang baik dan mendapatkan kekuatan yang spesifik dalam rangka mempertahankan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia. Memiliki tidak kurang dari 17.504 pulau besar dan kecil. Menyimpan kekayaan alam yang melimpah dan Papua adalah salah satu daerah yang sangat strategis dan kaya sumber daya alam tetapi memiliki kecenderungan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Kecenderungan untuk ancaman pada NKRI ditandai dengan munculnya sebuah gerakan kemerdekaan di bawah Organisasi Papua Merdeka (OPM). Selain itu, gerakan ini telah menimbulkan beberapa permasalahan seperti masalah perbatasan, konflik vertikal, horizontal, dan komunal, dan juga pencurian terhadap sumber daya alam yg ada di daerah papua. Karena itu untuk mengatasi masalah tersebut diatas perlu pemikiran dalam pelaksanaan pembangunan didaerah papua harus disesuaikan dengan aspirasi penduduk lokal sehingga hal ini dapat memupuk dan munumbuh kembangkan jiwa nasionalisme bagi penduduk papua dan konsep tersebut merupakan hal yg sangat penting untuk dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan kedaulatan sebuah negara. Kondisi pembangunan kekuatan TNI AD di daerah Papua sebagai komponen utama merupakan fokus dari penelitian ini.

Hal ini dihadapkan dengan dinamika ancaman yg selalu berubah intensitasnya dan juga sulit diprediksi, yang selanjutnya membawa kita pada sebuah asumsi bahwa kekuatan sistem pertahanan dan keamanan

perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan faktor geografis, ancaman, dan ketersediaan anggaran. Usaha-usaha untuk memodernisasi dan meningkatkan sistem pertahanan merupakan hal yg sangat mendesak guna pencapaian komponen pertahanan yg ideal dalam rangka mengamankan dan mempertahankan negara. Untuk membangun sistem pertahanan nasional dibutuhkan buku cetak biru (blue print) sebagai pedoman dasar dan standart dalam membangun pertahanan nasional yg tangguh. Setelah memiliki sebuah konsep sistem pertahanan yang benar dan sebagai sebuah instrumen dalam pembangunan kekuatan utama pertahanan, maka kekuatan intinya berada di TNI AD sebagai komponen utama pertahanan negara.

Tugas dan wewenang TNI AD dalam menghadapi ancaman Militer dan Nonmiliter, sesuai UU TNI Pasal 7 ayat (1), tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Operasi Militer untuk perang dan Operasi Militer selain perang.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan kedaulatan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan yang dimaksud dalam hal ini melingkupi permasalahan – permasalahan yang melatarbelakangi ancaman militer, yang di mana pertahanan negara didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yaitu dalam segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan

segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi pelanggaran wilayah, pemberontakan, bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan darat, serta konflik komunal. Pertahanan Non Militer terhadap ancaman non militer pada hakikatnya Pertahanan terhadap ancaman yang menggunakan faktor - faktor non militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Dalam konteks sumber daya manusia pertahanan negara, Indonesia hanya memiliki 0,2% dari jumlah penduduk negara, atau hanya 2 prajurit per seribu penduduk. Situasi yang tidak memuaskan ini tentunya tidak proporsional dengan ancaman yang terjadi. Mengingat Indonesia saat ini tidak sedang berperang, sumber daya manusia negara tersebut tidak berbanding lurus dengan jumlah personel militer. Untuk mengatasi potensi ancaman yang semakin meningkat, baik itu agresi militer dari negara lain maupun kerusuhan internal, maka kebutuhan pertahanan harus ditingkatkan. Oleh karena itu, penyediaan sumber daya manusia pertahanan negara mutlak diperlukan untuk menutupi kekurangan sumber daya manusia yang ada. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menyiapkan sumber daya, khususnya SDM pertahanan adalah dengan merekrut Komponen Cadangan pertahanan.

4.3.2 Pembangunan Komponen Cadangan Matra Darat Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Angkatan Darat Terhadap Pertahanan Negara

Sejarah Komponen Cadangan diawali pada masa penjajahan Belanda. Ketika berlangsungnya perang dunia I, Belanda membentuk wajib militer (*Hulpleger*) bagi kaum pribumi, tapi pada tahun 1927 pembentukan wajib militer ditanggihkan karena alasan: kekurangan dana; kekhawatiran akan adanya perlawanan bersenjata dari bumi putera kepada Belanda; dan

adanya pemunculan kekuatan militer Jepang di Asia Timur serta ancaman kekuatan militer Jerman untuk membalas kekuatan militer negara-negara Eropa pada Tahun 1927.

Pembuatan UU wajib militer yang dibentuk oleh Belanda berdasarkan kepada UU *Defensif Grondslag* yang bertujuan untuk: memantapkan kekuatan pertahanan; dan memperteguh kekuatan tempur yang dimiliki. Implementasi UU tersebut memiliki konsekuensi logis bagi bumi putera yang tergabung dalam kekuatan militer Belanda. Konsekuensi logis tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, bagi bumi putera yang dinyatakan lulus di jalur kekuatan pertahanan terikat masa dinas 1,5 tahun dan masa kerja 16 tahun; dan *Kedua*, bagi bumi putera yang dinyatakan lulus di jalur kekuatan tempur terikat masa dinas 3 tahun dan bermasa cadangan selama 12 tahun. Wajib militer pada jaman penjajahan Belanda tergabung dalam KNIL (*Koninklijke Nederlands Indische Lieger*).

Peralihan kekuasaan penjajahan Belanda kepada Jepang terjadi pada Tahun 1942. Jepang lebih aktif untuk merekrut bumi putera ke dalam barisan militer. Barisan militer yang dibentuk oleh Jepang adalah sebagai berikut: PETA (Pembela Tanah Air) atau *Gyugun* merupakan kekuatan militer yang dibentuk sebagai angkatan darat, yang semula bernama "Pasukan Sukarela Pembela Tanah Djawa" ; *Heiho* dan *Kaigun* merupakan kekuatan militer bagian laut; dan *Rikugun* dan *Koku Butai* bagian dari angkatan udara. Pembentukan kekuatan militer tersebut bertujuan untuk menghadapi serangan dari Negara Sekutu. Pembentukan PETA oleh Jepang merupakan latar belakang dalam pembentukan "Komponen Cadangan" bagi kekuatan militer Jepang.

Dimasa kemerdekaan, untuk menjaga dan mempersiapkan kewaspadaan rakyatnya, pemerintah melalui Dewan Pertahanan Negara (DPN) mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan DPN Nomor 13/1946 berisi kewajiban tiap-tiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan

yang berusia antara 16 sampai dengan 50 tahun wajib turut serta mempertahankan tanah air dalam barisan cadangan (BARISAN). Pada saat terjadinya Agresi Militer Belanda II, dibentuklah pemerintah militer (keadaan Darurat Militer). Secara spesifik dibentuk Kader Desa dan Kader Dukuh melalui Maklumat Markas Komando Djawa (MBKD) No. 2 MBKD tanggal 22 Desember 1948. Kader Dukuh dan Kader Desa ini secara terminologi sama dengan BARISAN yang memiliki karakteristik kemampuan melakukan taktik militer. Secara implisit, sesungguhnya kelompok BARISAN sudah mereprestasikan Komponen Cadangan secara formal. Ketika proses mobilisasi dari setiap kekuatan rakyat yang dibentuk dalam Kader Desa dan Kader Dusun maupun BARISAN kedalam pertempuran dengan pihak Belanda, MBKD mengeluarkan instruksi MBKD Nomor 11/MBKD/1949 tanggal 25 Januari 1949 yang mengatur pembentukan Pasukan Gerilya Desa. Seperti halnya di Sumatera Barat (Sumbar) pada tingkat kampung dibentuk Badan Pengawal Negeri dan Kota (BPNK) dengan bertugas mendukung perbekalan dan logistik pasukan yang dikumpulkan dari rakyat secara gotong royong. Sebagian anggota BPNK bergabung membentuk Pasukan Mobil Teras (PMT) dan aktif membantu tentara di medan tempur sebagai kurir untuk menyampaikan pesan-pesan penting. Dengan karakteristik struktur dan tugas Pasukan Gerilya Desa (Pager Desa), BPNK dan PMT secara substantif merupakan bentuk dari mobilisasi sesuai dengan instruksi MBKD yang merupakan bagian dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Budi Susilo Soepanji, 2010).

Sebagai negara kepulauan, posisi geopolitik Indonesia sangat strategis, diapit oleh dua samudra (India dan Pasifik) dan dua benua (Asia dan Australia). Indonesia juga memiliki beberapa choke point, yaitu jalur transportasi internasional Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Keadaan ini tidak diragukan lagi merupakan peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan ekonominya, namun perlu diwaspadai dengan intensitas ancaman yang nampaknya semakin tinggi. Beberapa

ancaman terkini adalah: terorisme, separatis bersenjata, ancaman dari kelompok radikal, konflik masyarakat, keresahan sosial, pembajakan dan pembajakan laut, imigrasi ilegal, penangkapan ikan ilegal, pembalakan liar dan penyelundupan. Berdasarkan buku putih pertahanan negara, diperkirakan potensi ancaman asing berupa agresi militer tidak mungkin terjadi, namun bukan berarti tidak ada lagi ancaman agresi.

Sebagai negara yang memiliki kondisi geografi yang luas (peringkat ke-15 dunia) yang terdiri atas 17.395 Pulau dengan wilayah perairan 9.909 km garis pantai dan 7,9 juta km² laut, Indonesia sangat rawan terhadap beragam bentuk ancaman baik militer maupun non militer. Kondisi ini membuat Indonesia membutuhkan postur pertahanan yang kuat, sehingga membutuhkan pembangunan kekuatan pertahanan berdasarkan pada kapabilitas (*capability based defense*).

Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia dan jelas mendapat manfaat dari sumber daya manusia yang melimpah. Namun, tanpa keterampilan bertahan yang mumpuni dan dukungan peralatan pertahanan, jumlah sumber daya manusia tidak selalu dapat menjamin terbentuknya sistem pertahanan yang baik dan efektif. Indonesia juga saat ini menerima bonus demografi, dengan generasi muda paling produktif, sementara generasi muda semakin muda, sementara jumlah lansia masih sedikit. Dari tahun 2020 hingga 2030, total usia angkatan kerja (15-64 tahun) akan mencapai 70%. Kondisi ini merupakan peluang emas bagi Indonesia untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan membangun ketahanan nasional.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan anggota Komponen Cadangan bukan hanya meningkatkan *man power* saja dalam sistem pertahanan Negara, tetapi juga mewujudkan *human capital* yang akan membangun kesadaran setiap warga negara tentang hak dan kewajiban dalam upaya bela negara, sehingga dengan terbangunnya kesadaran

tentang hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara akan berdampak kepada efek penangkalan (*deterrence effect*). Efek penangkalan sangat efektif dan strategis dalam menghadapi perang generasi ke-empat yang tidak mengenal medan pertempuran.

Stockley (2003) mendefinisikan pengertian *human capital* sebagai *"The term of human capital is recognition that people in organization and business are an important and essential asset who contribute to development and growth, in a similar way as physical asset such as machines and money. The collective attitude, skill and abilities of people contribute to organization performance and productivity. Any expenditure in training, development, health, and support is an investment, not just an expense"*.

Artinya bahwa *human capital* merupakan konsep yang menjelaskan bahwa manusia dalam organisasi dan bisnis merupakan aset yang penting dan beresensi, yang memiliki sumbangan terhadap pengembangan dan pertumbuhan, sama seperti halnya aset fisik misalnya mesin dan modal kerja. Sikap, keterampilan, dan kemampuan manusia memiliki kontribusi terhadap kinerja dan produktivitas organisasi. Pengeluaran untuk pelatihan, pengembangan, kesehatan, dan dukungan merupakan investasi dan bukan hanya biaya tetapi merupakan investasi.

Human capital merupakan aset yang sangat penting bagi suatu organisasi dalam mendukung tercapainya kemajuan suatu organisasi/perusahaan dengan didukung pelatihan yang menunjang manusianya. Saat ini, sumber daya manusia (SDM) menjadi sesuatu yang menarik perhatian banyak pihak. Penyebutan *human capital* untuk sumber daya manusia sepertinya belum banyak dianut oleh para pelaku organisasi, padahal peran SDM terhadap masa depan suatu organisasi sangat menentukan. Sumber daya manusia adalah *capital* yang dapat terus berkembang seiring dengan waktu dan dinamisnya lingkungan serta kemajuan ilmu pengetahuan.

Pandangan manusia sebagai sumber daya perlahan mulai tergeser oleh paradigma baru yaitu manusia sebagai modal utama. Manusia bukan lagi menjadi objek, tetapi manusia adalah sumber yang harus didayagunakan seperti mengelola modal. Pelatihan bagi peningkatan kompetensi manusia sudah dilakukan, tidak mengutamakan analisis gap, tetapi sudah berdasarkan analisis bakat.

Dijaman *human resources management*, manusia dilihat kompetensinya dan dibandingkan dengan kompetensi yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan/posisinya saat ini. Bila kompetensi yang didapat berdasarkan hasil pengukuran melebihi atau sama dengan kompetensi yang dipersyaratkan, maka pelatihan yang diberikan lebih bersifat pengembangan diri (*enrichment*). Namun, apabila dari hasil pengukuran lebih rendah dari kompetensi yang dipersyaratkan, maka untuk menghilangkan kelemahan ini (*weakness*) diberikan pelatihan yang sesuai dengan kemampuannya.

Pada saat ini manusia dipaksa bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan kompetensinya dan diberi pelatihan agar kompetensinya sesuai dengan yang dipersyaratkan. Pada *human capital management*, manusia perlu dicari dulu bakatnya dan kemudian pelatihan yang diberikan mengacu pada bakat yang dimiliki oleh manusia tersebut. Jadi manusia dikembangkan berdasarkan bakatnya, sehingga bakat yang dimilikinya termanfaatkan secara optimal. Untuk itu ada beberapa aspek yang menurut peneliti perlu mendapat perhatian dalam proses pembentukan Komcad Matra Darat, yaitu:

4.3.2.1 Sosialisasi

Kementerian Pertahanan melalui Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjenpothan) dapat bekerja sama dengan Kementerian

Komunikasi dan Informatika dalam mengkampanyekan program Komponen Cadangan pertahanan negara disamping memanfaatkan Satkowil tingkat Kodim dan Koramil serta satuan Penerangan di jajaran TNI AD. Kampanye program Komcad untuk Pertahanan Negara ini bisa disampaikan melalui berbagai media cetak maupun elektronik termasuk juga media sosial untuk menarik minat para milenial masuk dan terlibat dalam sistem pertahanan negara.

4.3.2.2 Latihan Dasar Militer dan Pelatihan Penyegaran

Faktor utama organisasi ialah manusia, karena hanya dengan adanya manusia, suatu organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Demikian pula halnya dengan Komponen Cadangan, sebagai organisasi militer Komcad Matra Darat di samping mempunyai persyaratan dasar organisasi, juga dilengkapi dengan peralatan dan persenjataan yang membutuhkan penanganan secara baik dan benar agar organisasi dapat berjalan dan tujuan yang telah digariskan dapat tercapai dengan baik.

Pembinaan sumber daya manusia pada Komcad Matra Darat diibaratkan seperti modernisasi aspek manusia dan manusia ditempatkan pada posisi penting dalam organisasi ini. Dengan demikian, pembinaan sumber daya manusia merupakan titik sentral dalam pembangunan kekuatan dan kemampuan Komcad Matra Darat yang diharapkan dapat menentukan keberhasilan TNI AD dalam melaksanakan tugas pokoknya. Berangkat dari pemikiran tersebut, pembinaan sumber daya manusia Komcad Matra Darat harus dilaksanakan secara konseptual, sistematis, berencana, dan berlanjut.

Lembaga pendidikan militer merupakan pilar utama dalam pembentukan profesionalisme prajurit TNI maupun Komponen Cadangan. Profesionalisme prajurit dapat dibentuk melalui lembaga-lembaga

pendidikan yang selanjutnya dilakukan pembinaan/latihan penyegaran di satuan dan diaplikasikan di daerah operasi. Keseluruhan siklus tersebut seharusnya dipelihara secara berkesinambungan serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan periodik. Setiap umpan balik dari suatu proses pembentukan, pembinaan, ataupun pengujian profesionalisme, secara intensif dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan mengacu pada sistem manajemen mutu pendidikan yang ditetapkan oleh TNI AD. Kemampuan personel yang mengawaki organisasi TNI AD dan Komcad sangat ditentukan oleh kualitas keluaran hasil didik dari setiap lembaga pendidikan militer di jajaran TNI AD. Melalui pendidikan akan meningkatkan sikap disiplin, patriotisme dan cinta tanah air.

Proses Latsarmil bagi calon Komcad seharusnya sama dan setingkat dengan Pendidikan Dasar Militer bagi calon Tamtama ataupun calon Bintara Prajurit Karier. Jangan sampai ada stigma atau pandangan tentang kemampuan tempur Komcad jauh dibawah pasukan TNI. Oleh karena itu proses seleksi dan Pendidikan/pelatihan penyegaran harus dimaksimalkan. Setidaknya dalam kurikulum Latsarmil Komcad Matra Darat wajib berisi materi dan praktek peraturan militer dasar (Permildas) berupa Peraturan Penghormatan Militer (PPM), Peraturan Baris Berbaris (PBB), Peraturan Dinas Garnisun (PDG), Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD) dan Tata Upacara Militer (TUM). Untuk aspek pengetahuan digunakan parameter “mengetahui, mengerti, memahami, dan menguasai”. Adapun untuk aspek keterampilan menggunakan parameter” dapat terbatas, dapat, mampu, dan mahir”.

4.3.2.3 Kesejahteraan dan Moril

Hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) sampai dengan bulan September 2020 mencatat jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270.20 juta jiwa.

Tabel 5. Jumlah Penganggur Terbuka Menurut Golongan Umur (dalam juta)

Kelompok Umur - UB	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kelompok Umur	
	2020	
15-19		24.34
20-24		18.71
25-29		9.77
30-34		5.75
35-39		4.32
40-44		3.92
45-49		3.54
50-54		3.61
55-59		3.21
60 keatas		1.7
Rata-Rata		7.07

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Menurut BPS, pada rentang usia 20 sampai 34 tahun terdapat 34.23 juta pengangguran terbuka. Sedangkan sasaran rekrutmen Komcad ada di usia 18-35 tahun. Itu artinya kemungkinan besar pelamar belum memiliki pekerjaan/penghasilan. Hal ini menimbulkan kerawanan disaat sebuah aset pertahanan negara yang sudah terlatih untuk membunuh “musuh negara” tidak memiliki penghasilan untuk hidup. Perlu ada perhatian dari Kementrian Pertahanan agar tidak hanya mendidik dan melatih kemudian mengembalikan ke masyarakat. Pemberian pembekalan keterampilan tertentu dapat menjadi solusi agar Komcad dapat terserap lapangan kerja. Selain itu Kementrian Pertahanan juga dapat bekerjasama dengan Lembaga tertentu guna menyalurkan Komcad untuk bekerja dilembaga tersebut.

4.3.2.4 Struktur Organisasi Komponen Cadangan Matra Darat

Setelah Komcad Matra Darat selesai melaksanakan Latsarmil, selanjutnya perlu dipikirkan jabatan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Istilah lain dikenal dengan *the right man on the right place*. Berdasarkan kompetensi, ditempatkanlah personel pada jabatan/posisi kerja yang sesuai dengan bakatnya. Penelusuran potensi untuk mendapat orang yang tepat pada jabatan yang tepat dilakukan berdasarkan hasil tes psikologi, hasil pendidikan, serta bakat dan prestasi Komcad di lapangan/masyarakat. Pada era *human resources management*, yang menjadi perhatian adalah bagaimana seseorang mempunyai kompetensi sesuai dengan jabatan/posisi kerjanya.

Konsep *human capital management* (HCM) menjawab pemikiran itu dengan menempatkan personel yang berbakat tinggi untuk menempati jabatan/posisi yang cocok dan sesuai dengan bakat mereka. Itu merupakan hal yang penting dalam mengelola SDM. Organisasi yang berhasil ialah mereka yang mampu melihat SDM sebagai aset yang harus dikelola sesuai dengan kebutuhan organisasi karena hal itu akan membuat organisasi menjadi lebih bernilai guna, terutama dalam menghadapi lingkungan yang terus berubah.

Struktur Orgas Komcad yang serupa dengan Batalyon menuntut kompetensi yang harus dimiliki oleh personelnnya, kemampuan tersebut harus sama seperti yang dimiliki oleh prajurit Batalyon yaitu:

- 1) Dengan daya gerak dan daya tembak yang dimilikinya, mampu mencari dan mendekati musuh untuk menghancurkan kemauan, kemampuan dan kekuatan bertempur musuh serta menawanannya.

- 2) Menangkis serangan musuh dengan pertempuran jarak dekat, perkelahian dan serangan balas.
- 3) Merebut, menguasai, menduduki dan mempertahankan medan.
- 4) Melaksanakan operasi berdiri sendiri dalam ruang dan waktu tertentu.
- 5) Mengadakan perlawanan terhadap operasi mobil udara.
- 6) Melakukan patroli-patroli pengintaian jarak jauh.
- 7) Melakukan berbagai operasi taktis di segala bentuk medan antara lain:
 - a) Operasi Serangan.
 - b) Operasi Pertahanan.
 - c) Operasi Pemindahan Ke Belakang.
 - d) Operasi Pengintaian.
 - e) Operasi Mobil Udara.
 - f) Operasi Pengaruh Nubika.
 - g) Operasi Gerilya.
 - h) Operasi Lawan Gerilya.
 - i) Operasi Dalam Kondisi Khusus.
- 8) Melaksanakan operasi gabungan bila diberi latihan dan peralatan untuk itu.
- 9) Melaksanakan tugas-tugas yang lain diberikan oleh komando atas.

Kemampuan yang harus dimiliki oleh sebuah Batalyon Komcad seperti yang dijabarkan di atas perlu diberikan dan dilatihkan pada saat

Diksarmil dan latihan penyegaran. Komposisi dalam struktur organisasi Batalyon Komcad perlu adanya penempatan jabatan untuk personel TNI aktif sebanyak 30% guna meminimalisir dampak dari faktor lupa, tidak terbiasa dan ragu-ragu akibat jeda waktu kosong yang cukup lama dalam mengingat kembali materi dan praktek yang diberikan selama Latsarmil dan latihan penyegaran. 30% jumlah personel TNI aktif yang ditempatkan pada Yonkomcad merupakan bentuk pendampingan sehingga dapat memaksimalkan kekuatan tempur Batalyon saat terjadi mobilisasi.

4.3.2.5 Penggunaan Komponen Cadangan Matra Darat

Pembentukan Komponen Cadangan merupakan tugas pemerintah c.q. Kementrian Pertahanan, untuk mewujudkan daerah-daerah pangkal perlawanan dan mewujudkan kekuatan perlawanan rakyat yang sudah terorganisasi, dilengkapi, dan terlatih guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama.

4.3.2.5.1 Sistem Kendali

Angkatan Darat memiliki 332 Kodim dan 3.630 Koramil menjadikannya sebuah keuntungan tersendiri.

Tabel 6. Data Satkowil AD sampai dengan bulan November 2020

NO	KODAM	KOREM	KODIM	KORAMIL
1.	I / BUKIT BARISAN	5	33	362
2.	II / SRIWIJAYA	5	31	256
3.	III / SILIWANGI	4	24	368
4.	IV / DIPONEGORO	4	36	595
5.	V / BRAWIJAYA	4	33	594

6.	VI / MULAWARMAN	3	25	189
7.	IX / UDAYANA	3	29	184
8.	XII / TANJUNGPURA	2	15	197
9.	XIII / MERDEKA	3	14	148
10.	XIV / HASANUDDIN	3	29	218
11.	XVI / PATTIMURA	2	12	67
12.	XVII / CENDERAWASIH	3	12	93
13.	XVIII / KASUARI	2	10	66
14.	JAYA/JAYAKARTA	2	10	83
15.	ISKANDAR MUDA	2	19	210
JML	15	47	332	3.630

Sumber: Staf Teritorial Angkatan Darat

Pasalnya, satminkal ini dapat digunakan sebagai pengendali dan pengawasan personel Komcad Matra Darat (saat berstatus non aktif) layaknya seperti kegiatan apel dalam rutinitas harian di pasukan TNI. Apel merupakan suatu cara pengecekan terhadap kehadiran anggota pada saat tertentu sehingga dapat diketahui jumlah anggota yang hadir dan tidak hadir dengan keterangannya serta merupakan sarana komunikasi antara atasan dengan bawahan. Komcad yang sedang tidak aktif diwajibkan untuk melaporkan kehadiran dan domisili sebagai bentuk update data personel. Babinsa dapat ditugaskan untuk menghimpun keterangan tersebut dari Komcad secara periodik (TW) dan melaporkannya secara berjenjang.

4.3.2.5.1 Nilai Strategis

Dalam menghadapi kemungkinan ancaman yang mungkin terjadi, baik ancaman militer, ancaman non militer maupun ancaman hibrida

dibutuhkan usaha dalam membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan yang disegani serta memiliki daya tangkal (*deterrence effect*) yang tinggi. Pembentukan Komcad tentunya akan menambah kekuatan tempur pasukan TNI AD. Jumlah pasukan TNI AD saat ini ada sekitar 400.000 personel (menurut data GFP) dan dengan akan dibentuknya Komcad sebanyak 25.000 personel di tahun 2021 merupakan bentuk perkuatan pasukan tempur. Artinya ada peningkatan kekuatan sebanyak 6,25% dilihat dari sisi jumlah pasukan.

Dikembalikannya Komcad kepada masyarakat setelah melaksanakan Latsarmil maupun latihan penyegaran dapat mendudukan mereka sebagai badan pengumpul (Bapul) ataupun badan pengumpul keterangan (Bapulket).

Bapul mempunyai kewajiban untuk melaporkan informasi yang diperolehnya secara spontan. Laporan Bapul merupakan salah satu laporan tentang suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi dimanapun mereka berada baik dalam melaksanakan kegiatan kedinasan maupun kegiatan di luar kedinasan dalam rangka deteksi dini dan lapor cepat. Dalam melaksanakan kegiatannya, Komcad sebagai Bapul tidak dituntut untuk mencari keterangan tetapi wajib untuk melapor kepada pimpinan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan dan kepada pejabat/badan/satuan lain sebagai informasi, apabila mengetahui suatu kejadian atau peristiwa yang dilihat maupun didengar.

Pembentukan Komcad merupakan langkah efisiensi anggaran negara. Estimasi alokasi anggaran untuk pembentukan 25.000 personel Komcad Matra Darat tahun 2021 sekitar Rp 1 triliun (Dahnil Anzar Simanjuntak, 2021). Artinya negara hanya mengeluarkan uang Rp 40 juta untuk menghasilkan 1 personel Komcad Matra Darat yang siap tempur memenuhi panggilan mobilisasi tanpa mengeluarkan biaya perawatan (gaji, ULP, tunjangan kinerja, tunjangan pensiun, tunjangan kesehatan, dll).

Tabel 7. Perbandingan pengeluaran anggaran Komcad dan TNI dalam 1 tahun pangkat tamtama (Prada)

NO	KEPERLUAN	1 PERSONEL KOMCAD	1 PERSONEL TNI	KETERANGAN
1	Seleksi pelantikan s.d.	40.000.000	40.000.000	
2	Gaji	-	1.643.500 X 12	PP NO 28 TH 2001
3	Tunjangan kinerja	-	1.968.000 X 12	Perpres No 102 Th 2018
4	Uang Lauk Pauk	-	60.000 X 365	
TOTAL		40.000.000	105.238.000	

Sumber: analisa penulis

Indeks pembentukan 1 orang Komcad dipersamakan dengan indeks pembentukan 1 orang prajurit TNI AD (golongan Tamtama). Perbandingan kasar dilihat dari 4 indikator diatas sudah menunjukkan angka yang cukup signifikan dalam menghasilkan aset sumber daya manusia untuk pertahanan.

Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara menjadi tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama sistem pertahanan negara. Untuk itu, TNI harus memiliki efektivitas dan kemampuan tempur terbaik. Pengembangan kekuatan TNI dilakukan secara bertahap dan terus disusun dalam rencana strategis lima tahunan, dan disesuaikan dengan sistem dan kebijakan nasional, kemampuan nasional, dan kondisi lingkungan strategis global, regional bahkan nasional. adanya rencana untuk membentuk Komponen Cadangan merupakan salah satu kebijakan yang tepat dalam upaya melakukan optimalisasi kekuatan

TNI AD sebagai kekuatan utama pertahanan negara di matra darat. Oleh karena itu, dengan berbagai kondisi yang ada di atas, peneliti berkeyakinan bahwa Komponen Cadangan khususnya matra darat merupakan satu jalan yang bisa dilakukan untuk memperkuat pertahanan negara Indonesia.